



Mekanisme Tata Kelola Internal dan Pengungkapan Antikorupsi Perusahaan di Indonesia

Destia Dwi Putri ¹⁾; Yuni Putri Yustisi ²⁾

¹⁾Sharia Accounting Study Program, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

²⁾Accounting Diploma Program, Universitas Teknologi Yogyakarta

Email: ¹⁾destia@stainkepri.ac.id; ²⁾yuni.putri.yustisi@staff.uty.ac.id

How to Cite:

Putri, D. D., Yustisi Y. P. (2022). Mekanisme Tata Kelola Internal dan Pengungkapan Antikorupsi Perusahaan di Indonesia. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 10(2) . doi: <https://doi.org/10.37676/ekombis.v10i2>

ARTICLE HISTORY

Received [12 Juni 2022]

Revised [4 Juli 2022]

Accepted [26 Juli 2022]

KEYWORDS

Anticorruption

Disclosure, Internal
Governance Mechanisms

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris hubungan antara mekanisme tata kelola internal dengan pengungkapan antikorupsi perusahaan di Indonesia. Mekanisme tata Kelola internal yang diuji berupa independensi dewan, komite audit, konsentrasi kepemilikan, dan kepemilikan keluarga. Penelitian ini adalah penelitian *cross sectional* dengan pendekatan kuantitatif, data yang digunakan adalah data sekunder. Sampel penelitian ini adalah 100 perusahaan nonkeuangan di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kapitalisasi pasar terbesar tahun 2019. Penelitian ini menemukan bahwa mekanisme tata Kelola internal pada bagian komite audit memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan antikorupsi perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa peran komite audit memiliki pengaruh besar dalam meningkatkan transparansi khususnya dalam pencegahan praktik korupsi di lingkungan perusahaan.

ABSTRACT

This study aims to empirically examine the relationship between internal governance mechanisms and corporate anti-corruption disclosure in Indonesia. Internal governance mechanisms tested are independence of board, audit committee, ownership concentration, and family ownership. This research is a cross sectional study with a quantitative approach, the data used is secondary data. The sample of the study is 100 non-financial companies in Indonesia which are listed on Indonesia Stock Exchange with the largest market capitalization in 2019. This study finds that the internal governance mechanism on the part of audit committee has a positive influence on corporate anti-corruption disclosure. This shows that the role of audit committee has a major influence increasing transparency in preventing corrupt practices in the company environment.

PENDAHULUAN

Korupsi diartikan sebagai tindakan atau praktik langsung maupun tidak langsung memberi, meminta, atau menerima secara tidak pantas sesuatu yang berharga yang bertujuan untuk mempengaruhi pihak lain (World Bank, 2018). Ashforth *et al.* (2008) menjelaskan konsep korupsi suatu organisasi tidak hanya menggambarkan perilaku etis setiap individu yang menyalahgunakan kekuasaan, tapi sesuatu yang sangat berbahaya yang dapat menyebar ke individu lain sehingga memperbesar ruang lingkungannya. Data World Bank menunjukkan bahwa kurang lebih bisnis dan

individu melakukan penyuaipan sebesar \$1,5 triliun setiap tahunnya, hal ini dapat merugikan pembangunan dunia yang berdampak pada kemiskinan di beberapa negara. Oleh karena itu, pencegahan praktik korupsi merupakan tujuan utama *The World Bank Group* dan beberapa mitranya (World Bank, 2017).

Dampak buruk dari praktik korupsi menjadikan setiap negara membuat peraturan untuk pemberantasannya dengan melaksanakan praktik antikorupsi. Joseph *et al.* (2016); Krishnamurti, Shams, dan Velayutham (2018) menyatakan bahwa praktik antikorupsi merupakan salah satu praktik *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dapat menurunkan risiko korupsi di tingkat perusahaan. Praktik antikorupsi yang dilakukan perusahaan harus dijelaskan secara transparan demi meyakinkan publik bahwa praktik dengan benar telah dilakukan perusahaan. Transparansi dapat dilakukan dengan pengungkapan informasi terkait praktik antikorupsi. Haniffa dan Cooke (2002); Al-Shammari dan Al-Sultan (2010) menyatakan semakin luas pengungkapan informasi, maka semakin tinggi tingkat transparansi perusahaan tersebut.

Luas pengungkapan dapat dipengaruhi oleh beberapa aspek salah satunya adalah mekanisme tata kelola. Menurut Brown, Beekes, dan Verhoeven (2010); Gillan (2006) terdapat dua kategori mekanisme tata kelola perusahaan, yaitu mekanisme tata kelola eksternal dan internal. Penelitian ini hanya berfokus pada tata kelola internal perusahaan. Studi literatur mengenai pengungkapan lintas negara selalu mengabaikan pengaruh yang berasal dari faktor eksternal dan internal perusahaan (Bushee, 2004; Miller, 2004; dan Dong dan Stettler, 2011). Oleh karena itu, penelitian ini menguji secara empiris apakah ada hubungan antara faktor internal perusahaan yang ditunjukkan dengan mekanisme tata kelola internal dengan luas pengungkapan antikorupsi perusahaan di Indonesia. Pada tahun 2019 Indonesia mendapat skor *Corruption Perceptions Index* (CPI) 40 yang berada di peringkat 85 dari 180 negara yang didata oleh *transparency international* (Transparency International, 2019). Data tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih berada pada kasus korupsi yang tinggi. Indonesia sebagai negara kepulauan yang sedang berkembang harus dapat menanggulangi permasalahan korupsi agar siap bersaing untuk naik ke level negara maju.

LANDASAN TEORI

Penelitian ini dikembangkan berdasarkan teori keagenan dan beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Teori keagenan menyatakan bahwa adanya hubungan yang terjadi antara *principal* dan *agent*. Dalam perusahaan publik *principal* diartikan sebagai pemegang saham dan *agent* adalah manajemen perusahaan. Teori keagenan menyatakan bahwa hubungan yang timbul antara *principal* dan *agent* cenderung menimbulkan masalah asimetri informasi. Masalah asimetri informasi dapat menimbulkan adanya konflik kepentingan akibat rendahnya kepercayaan *principal* kepada *agent* (Wolk, Dodd, dan Rozycki, 2013).

Wolk, Dodd, dan Rozycki (2013); Vanza, Wells, dan Wright (2018) menyatakan, konflik kepentingan dapat dikurangi dengan cara pengungkapan sukarela mengenai informasi perusahaan. Pihak manajemen harus melakukan pengungkapan informasi kepada *principal* guna meningkatkan transparansi kinerja perusahaan dan mengurangi persepsi negatif. Sejalan dengan teori keagenan, praktik antikorupsi harus diungkapkan secara luas demi mengurangi persepsi negatif publik terhadap kasus korupsi yang terjadi di sektor korporasi.

Hess (2009) menyatakan, pengungkapan antikorupsi menunjang perusahaan untuk mencapai tujuan akuntabilitas perusahaan dengan cara meningkatkan kesadaran publik dan memaksa mengadopsi prinsip antikorupsi. Dalam meningkatkan luas pengungkapan antikorupsi, perusahaan harus memperhatikan mekanisme tata kelola, karena di dalam tata kelola menerapkan sistem pengendalian untuk mengurangi konflik keagenan. Jika perusahaan dikelola dengan baik, maka pelaporan akan menjadi andal dan pengungkapan akan lebih luas dan tepat waktu (World Bank, 2016).

Pengungkapan Antikorupsi Perusahaan

Praktik antikorupsi merupakan upaya pencegahan yang dilakukan oleh regulator untuk mengurangi tingkat korupsi (Healy dan Serafeim, 2016). Setiap negara telah memiliki undang-undang dan peraturan hukum terkait praktik antikorupsi. Di Indonesia, praktik antikorupsi tercantum dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2018). Pada perusahaan publik, praktik antikorupsi harus dipaparkan secara transparan demi meningkatkan reputasi kepada pihak eksternal bahwa perusahaan telah melakukan praktik tersebut dengan benar. Transparansi dapat dilakukan dengan mengungkapkan informasi terkait praktik antikorupsi perusahaan.

Pengungkapan antikorupsi perusahaan merupakan salah satu upaya perusahaan untuk meningkatkan transparansi informasi terkait isu korupsi yang berkembang di sektor korporasi. Dampak positif yang timbul dari pengungkapan yang luas dapat meningkatkan transparansi guna mempertahankan nama baik perusahaan atas isu korupsi yang berkembang di dalam perusahaan (Khrishnamurti, Shams, dan Velayutham, 2018).

Mekanisme Tata Kelola Internal

Mekanisme tata kelola internal merupakan kontrol yang dilakukan oleh pemegang saham dan dewan (Brown, Beekes, dan Verhoeven 2010). Tata kelola internal disebut sebagai karakteristik perusahaan yang muncul karena adanya perbedaan kegiatan operasional dan faktor lain yang berasal dari dalam perusahaan. Gillan (2006); Brown, Beekes, dan Verhoeven (2010) menjelaskan bahwa tata kelola internal terdiri dari beberapa komponen seperti keanggotaan dewan dan komite, struktur kepemilikan saham, dan bentuk pengaturan pembiayaan dan kompensasi. Penelitian ini berfokus pada komponen tata kelola internal yang berhubungan dengan biaya keagenan yang muncul karena pemisahan kepemilikan, kurangnya pengendalian, dan adanya penyempitan biaya yang digunakan untuk mengontrol manajemen perusahaan (Droberz, Schillhofer, dan Zimmermann, 2004). Jadi, variabel tata kelola internal yang akan diuji adalah independensi dewan, komite audit, konsentrasi kepemilikan, dan kepemilikan keluarga.

Peran dewan memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan proses operasi perusahaan. Struktur dewan terdiri dari dua jenis, yaitu sistem *one-tier (unitary board)* dan sistem *two-tier (dual board)*. Sistem *one-tier* hanya memiliki satu dewan yang terdiri dari direktur eksekutif bertugas sebagai manajemen, dan direktur non-eksekutif bertugas sebagai pengawas manajemen (World Bank 2014). Sistem *two-tier* memiliki dewan direksi sebagai manajemen perusahaan dan dewan komisaris sebagai pengawas dewan direksi (National Committee on Governance, 2006). Indonesia menggunakan sistem *two-tier* dalam struktur dewan perusahaan.

Menurut teori keagenan, pengawasan yang dilakukan terhadap manajemen merupakan hal penting guna mengurangi konflik keagenan (Brown, Beekes, dan Verhoeven 2010). Oleh karena itu, dewan yang memiliki tugas sebagai pengawas harus memiliki sifat yang independen. Independensi dewan diukur dari besarnya *Independent Non-Executive Director (INED)* yang merupakan proporsi direktur non-eksekutif yang independen (Jaggi, Leung, dan Gul, 2009; Chau dan Gray 2010).

Pengawasan yang dilakukan oleh dewan bertujuan untuk memantau kegiatan manajemen dan kualitas pelaporan perusahaan, jadi semakin tinggi INED diasumsikan dapat meningkatkan luas pengungkapan antikorupsi. Argumen ini sejalan dengan temuan beberapa penelitian terdahulu bahwa INED berhubungan positif dengan luas pengungkapan informasi perusahaan, karena INED merupakan pengawas yang tepat untuk memantau aktivitas manajemen (Chau dan Gray, 2010; Garcia-Meca dan Sanchez-Ballesta, 2010). Jadi, dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama adalah: **H₁**: Ada hubungan positif antara independensi dewan dengan luas pengungkapan antikorupsi.

Komite audit adalah sub-komite dewan yang dibentuk oleh komisaris dengan tujuan untuk membantu tugas dan fungsi komisaris sebagai pengawas manajemen (Li, Mangena, dan Pike, 2012). Komposisi komite audit terdiri dari dewan independen dan tidak terikat dengan pihak-pihak dalam

manajemen. Komisaris dapat memilih anggota komite audit yang berasal dari luar perusahaan dengan kualitas, pengalaman, dan keahlian dibidangnya (Xie, Davidson, dan DaDalt, 2003).

Karamanou dan Vafeas (2005) menyatakan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, cara komite audit untuk melakukan evaluasi kinerja manajemen dengan melakukan pertemuan (*meeting*) antar anggota untuk membahas permasalahan seperti proses pelaporan informasi. Intensitas pertemuan memengaruhi tingginya pengawasan yang dilakukan komite audit, sehingga manajemen lebih transparan dalam menyajikan informasi. Literatur menyatakan, komite audit yang ditunjukkan dengan jumlah pertemuan berhubungan positif dengan pengungkapan sukarela (Al-Shammari dan Al-Sultan, 2010; Li, Mangena, dan Pike, 2012; Samaha, Khelif, dan Hussainey, 2015). Jadi, dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua adalah:

H₂: Ada hubungan positif antara komite audit dengan luas pengungkapan antikorupsi.

Konsentrasi kepemilikan adalah ukuran kepemilikan saham perusahaan publik yang timbul karena adanya pemisahan kepemilikan (La Porta, Lopez-de-Silanes, dan Shleifer, 1999). Terdapat dua sistem konsentrasi kepemilikan, yaitu terkonsentrasi dan tersebar. Kepemilikan terkonsentrasi adalah satu atau lebih investor yang memiliki saham minoritas yang besar dan insentif untuk memantau manajemen. Kepemilikan tersebar adalah penyebaran saham secara merata ke publik seperti perusahaan besar. Kedua sistem tersebut cenderung menimbulkan konflik keagenan. Kepemilikan terkonsentrasi menimbulkan konflik keagenan tipe 2 antara pemegang saham mayoritas dan minoritas, sedangkan kepemilikan tersebar menimbulkan konflik keagenan tipe 1 antara *principal* dan *agent* (Shleifer dan Vishny, 1997) yang harus diminimalisir dengan meningkatkan transparansi informasi perusahaan.

Cara meningkatkan transparansi informasi agar mengurangi konflik kepentingan yang terjadi karena pemisahan kepemilikan dengan meningkatkan luas pengungkapan sukarela (Haniffa dan Cooke, 2002; Al-Shammari dan Al-Sultan, 2010). Literatur menyatakan, konsentrasi kepemilikan berhubungan positif dengan luas pengungkapan informasi perusahaan karena kedua sistem konsentrasi kepemilikan cenderung menimbulkan konflik yang harus diminimalisir dengan meningkatkan pengungkapan informasi (Haniffa dan Cooke, 2002; Hidalgo, Garcia-Meca, dan Martinez 2011). Jadi, dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga adalah:

H₃: Ada hubungan positif antara konsentrasi kepemilikan dengan luas pengungkapan antikorupsi.

Sebagian besar perusahaan di Asia didominasi oleh perusahaan keluarga, sehingga kontrol keluarga ikut andil dalam aktivitas manajemen perusahaan (La Porta, Lopez-de-Silanes, dan Shleifer 1999). Kepemilikan keluarga adalah kontrol yang dilakukan oleh keluarga untuk mentransfer sumber daya perusahaan dari pemegang saham nonkeluarga kepada keluarga (Srinidhi, He, dan Firth, 2014). Perusahaan dapat dikatakan di kontrol keluarga, apabila anggota keluarga berada pada posisi dewan tertinggi dan memiliki kepemilikan saham minimal 20% di perusahaan tersebut (Ali, Chen, dan Radhakrishnan, 2007; Jaggi, Leung, dan Gul, 2009)

Menurut teori keagenan, kontrol keluarga dapat menimbulkan konflik keagenan tipe 2 antara pemegang saham keluarga dan nonkeluarga (Anderson dan Reeb, 2004). Pengawasan oleh keluarga menjadikan manajemen tidak berperilaku oportunistik dalam memengaruhi laba perusahaan, karena berpengaruh pada reputasi atau nama baik keluarga (Ali, Chen, dan Radhakrishnan, 2007), sehingga transparansi informasi akan selalu ditingkatkan. Literatur menyatakan, kepemilikan keluarga hubungan positif dengan luas pengungkapan informasi (Ali, Chen, dan Radhakrishnan, 2007; Chau dan Gray, 2010; dan Srinidhi, He, dan Firth, 2014). Jika perusahaan keluarga cenderung mempertahankan nama baik keluarga, maka diasumsikan perusahaan keluarga memiliki pengungkapan antikorupsi perusahaan yang luas. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat adalah:

H₄: Ada hubungan positif antara kontrol keluarga dengan luas pengungkapan antikorupsi.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian *cross sectional* dengan pendekatan kuantitatif. Sampel penelitian ini adalah 100 perusahaan nonkeuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kapitalisasi pasar terbesar tahun 2019. Data dikumpulkan dengan metode *archival* yang didapatkan dari laporan tahunan perusahaan. Variabel pengungkapan antikorupsi perusahaan menggunakan teknik pengumpulan data konten analisis, sedangkan variabel lainnya diambil dari informasi yang berada di laporan tahunan sesuai alat ukurnya.

Definisi Operasional

Penelitian ini terdiri dari tiga variabel yaitu dependen, independen, dan kontrol. Variabel dependen penelitian ini adalah *Corporate Anticorruption Disclosure* (CAD). Variabel independen terdiri dari *Independent Director* (ID), *Audit Committee* (AC), *Ownership Concentration* (OC), dan *Family Ownership* (FO). Variabel control terdiri dari Tipe Perusahaan (TYPE), Umur Perusahaan (AGE), dan Ukuran Perusahaan (SIZE).

Variabel CAD diukur menggunakan indeks berdasarkan *Transparency International's Content Scheme* tahun 2012 yang digunakan pada penelitian Blanc *et al.* (2017). ID diukur menggunakan proporsi INED seperti pada penelitian Chau dan Gray (2010). AC diukur menggunakan LN jumlah *meeting* saat tahun penelitian seperti pada penelitian Li, Mangena, dan Pike (2012). OC diukur menggunakan persentase kepemilikan pemegang saham terbesar di akhir tahun (La Porta, Lopez-de-Silanes, dan Shleifer, 1999). FO diukur menggunakan variabel *dummy* dengan kriteria "1" untuk perusahaan yang dikendalikan oleh keluarga dan "0" tidak, seperti pada penelitian (Ali, Chen, dan Radhakrishnan, 2007). TYPE diukur menggunakan variabel *dummy* dengan kriteria "1" untuk perusahaan yang *high profile* dan "0" tidak, seperti pada penelitian Hackston dan Milne (1996). AGE diukur menggunakan LN dari total tahun sejak perusahaan berdiri hingga tahun 2019 seperti pada penelitian Holderness (2017). SIZE diukur menggunakan LN total aset perusahaan akhir tahun seperti pada penelitian (Zeng, Lee, dan Zhang, 2016; Zeume, 2017; dan Kim, Li, dan Tarzia, 2018).

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data regresi linier berganda dengan alat statistik SPSS. Persamaan model regresi penelitian ini adalah sebagai berikut.

$$CAD_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 ID_{i,t} + \beta_2 AC_{i,t} + \beta_3 OC_{i,t} + \beta_4 FO_{i,t} + \beta_5 TYPE_{i,t} + \beta_6 AGE_{i,t} + \beta_7 SIZE_{i,t} \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan:

- β_0 : Konstanta
- β_{1-7} : Koefisien variabel independent
- $CAD_{i,t}$: *Corporate Anticorruption Disclosure*
- $ID_{i,t}$: *Independent Director*
- $AC_{i,t}$: *Audit Committee*
- $OC_{i,t}$: *Ownership Concentration*
- $FO_{i,t}$: *Family Ownership*
- $TYPE_{i,t}$: Tipe Perusahaan
- $AGE_{i,t}$: Umur Perusahaan
- $SIZE_{i,t}$: Ukuran Perusahaan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis

Gambaran umum data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat dari statistik deskriptif yang menyajikan total observasi, nilai maksimum, nilai minimum, mean, standar deviasi, dan frekuensi untuk variabel *dummy* yang disajikan sebagai berikut.

Tabel 1 Statistik Deskriptif

Variabel	N = 100					
	Nilai Min.	Nilai Maks.	Mean	Standar Deviasi	Frekuensi (1)	%
CAD	0,08	0,96	0,3528	0,28512	-	-
ID	0,17	0,75	0,4176	0,10953	-	-
AC	1,10	2,49	1,7064	0,41996	-	-
OC	10,19	98,31	53,3747	20,79801	-	-
AGE	1,39	4,50	3,4550	0,54653	-	-
SIZE	27,09	33,49	30,0634	1,35469	-	-
FO	-	-	-	-	51	51,00
TYPE	-	-	-	-	52	52,00

Sumber: Data Diolah, 2022

Selanjutnya *data preparation*, guna melihat apakah data tersebut sudah layak digunakan untuk analisis hipotesis. *Data preparation* terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas yang disajikan sebagai berikut.

Tabel 2 Data Preparation

Variabel	Normalitas			Multikolinieritas			Heteroskedastisitas	
	Nilai K-S Z	Sig.	Ket.	Tolerance	VIF	Ket.	Sig.	Ket.
CAD	0,084	0,082	√	-	-	-	-	-
ID				0,976	1,025	√	0,655	√
AC				0,772	1,296	√	0,386	√
OC				0,917	1,091	√	0,310	√
FO				0,916	1,092	√	0,233	√
TYPE				0,907	1,102	√	0,321	√
AGE				0,821	1,219	√	0,799	√
SIZE				0,762	1,312	√	0,383	√

Sumber: Data Diolah, 2022

Setelah data memenuhi kriteria uji *data preparation*, seperti data telah berdistribusi normal, setiap variabel tidak mengalami multikolinieritas dan heteroskedastisitas selanjutnya data tersebut digunakan untuk menguji hipotesis yang disajikan berikut.

Tabel 3 Uji Hipotesis

Variabel	Prediksi Arah	Koefisien Beta	t	Sig.	Keterangan
Constant		-5,296	-3,065	0,003	
ID	+	-0,964	-1,402	0,164	Tidak Terdukung
AC	+	0,521	2,583	0,011*	Terdukung
OC	+	0,004	1,010	0,315	Tidak Terdukung
FO	+	-0,117	-0,756	0,451	Tidak Terdukung
TYPE		0,070	0,450	0,654	Tidak Terdukung
AGE		0,195	1,299	0,197	Tidak Terdukung
SIZE		0,86	1,372	0,173	Tidak Terdukung
F					4,302 (P ≤ 0,001)
Adjusted R Square					0,189

*Tingkat Signifikansi 5%

Sumber: Data Diolah, 2022

Pembahasan

Penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5%. Tabel 3 hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel ID tidak terdukung karena nilai *sig.* (0,164) > 5% dapat diartikan bahwa H₁ ditolak. Variabel AC terdukung karena nilai *sig.* (0,011) < 5% dapat diartikan bahwa H₂ diterima. Variabel OC tidak terdukung karena nilai *sig.* (0,315) > 5% dapat diartikan bahwa H₃ ditolak. Variabel FO tidak terdukung karena nilai *sig.* (0,451) > 5% dapat diartikan bahwa H₄ ditolak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menguji secara empiris hubungan antara mekanisme tata kelola internal pengungkapan antikorupsi perusahaan di Indonesia. Mekanisme tata kelola internal yang diuji terdiri dari independensi dewan, komite audit, konsentrasi kepemilikan, dan kepemilikan keluarga. Temuan menarik dari penelitian ini adalah mekanisme tata kelola internal yang berhubungan dengan pengungkapan antikorupsi ialah komite audit. Hadirnya komite audit dianggap mampu untuk membantu tugas dan fungsi komisaris sebagai pengawas manajemen dalam memberikan transparansi informasi perusahaan khususnya praktik antikorupsi.

Independensi dewan tidak memiliki hubungan dengan pengungkapan antikorupsi, karena rata-rata pemegang saham pengendali di perusahaan Asia memiliki insentif dalam memilih dewan independen yang dapat dipercayai untuk memenuhi keinginannya (Chou, Hamill, dan Yeh, 2018), sehingga independensinya masih diragukan.

Konsentrasi kepemilikan tidak memiliki hubungan dengan pengungkapan antikorupsi, hal ini disebabkan oleh pemegang saham kehilangan insentif untuk menekan manajemen dalam memberikan informasi yang lebih, karena pemegang saham memiliki akses istimewa ke informasi perusahaan (Jankensgard, 2018). Kepemilikan keluarga tidak memiliki hubungan dengan pengungkapan antikorupsi, karena keluarga cenderung kurang memberikan informasi ke publik sebab perusahaan dianggap memiliki asimetri informasi yang lebih rendah (Cabeza-Garcia, Sacristan-Navarro, dan Gomez-Anson, 2017).

Saran

Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan lagi topik terkait pengungkapan antikorupsi dengan memperluas objek penelitian dalam skala besar (negara), menggunakan data panel, studi perbandingan tahun sebelum dan sesudah pandemi Covid-19, serta menggunakan instrumen konten analisis dari penelitian lain untuk mengukur pengungkapan antikorupsi perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Ashiq, Tai-Yuan Chen, dan Suresh Radhakrishnan. 2007. "Corporate Disclosure by Family Firms." *Journal of Accounting and Economics* 44 (1-2): 238-286.
- Al-Shammari, Bader, dan Waleed Al-Sultan. 2010. "Corporate governance and voluntary disclosure in Kuwait." *International Journal of Disclosure and Governance* 7 (3): 262-280.
- Anderson, Ronald C., dan David M. Reeb. 2004. "Board Composition: Balancing Family Influence in S&P 500 Firms." *Administrative Science Quarterly* 49 (2): 209-237.
- Ashforth, Blake E., Dennis A. Gioia, Sandra L. Robinson, dan Linda K. Trevino. 2008. "Introducing to Special Topic Forum: Re-viewing Organizational Corruption." *Academy of Management Review* 33 (3): 670-684.
- Blanc, Renata, Muhammad Azizul Islam, Dennis M. Patten, dan Manuel Castelo Branco. 2017. "Corporate Anti-corruption Disclosure: An Examination of the Impact of Media Exposure and Country-level Press Freedom." *Accounting, Auditing, and Accountability Journal* 30 (8): 1746-1770.
- Brown, Philip, Wendy Beekes, dan Peter Verhoeven. 2010. "Corporate Governance, Accounting and Finance: A Review." *Accounting and Finance* 51 (1): 96-172.
- Bushee, Brian J. 2004. "Discussion of Disclosure Practices of Foreign Companies Interacting with U. S. Market." *Journal of Accounting Research* 42 (2): 509-525.
- Cabeza-Garcia, Laura, Maria Sacristan-Navarro, dan Silvia Gomez-Anson. 2017. "Family Involvement and Corporate Social Responsibility Disclosure." *Journal of Family Business Strategy* 8: 109-122.
- Chau, Gerald, dan Sidney J. Gray. 2010. "Family Ownership, Board Independence and Voluntary Disclosure: Evidence from Hong Kong." *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation* 19 (2): 93-109.
- Chou, Hsin-I, Philip A. Hamill, dan Yin-Hua Yeh. 2018. "Are All Regulatory Compliant Independent Director Appointments the Same? An Analysis of Taiwanese Board Appointments." *Journal of Corporate Finance* 50: 371-387.
- Dong, Minyue, dan Alfred Stettler. 2011. "Estimating Firm-level and Country-level Effect in Cross-sectional Analyses: An Application on Hierarchical Modeling in Corporate Disclosure Studies." *The International Journal of Accounting* 46 (3): 271-303.
- Droberz, Wolfgang, Andreas Schillhofer, dan Heinz Zimmermann. 2004. "Corporate Governance and Expected Stock Return: Evidence from Germany." *European Financial Management* 10 (2): 267-293.
- Garcia-Meca, Emma, dan Juan P. Sanchez-Ballesta. 2010. "The Association of Board Independence and Ownership Concentration with Voluntary Disclosure: A Meta-analysis." *European Accounting Review* 19 (3): 603-627.
- Gillan, Stuart L. 2006. "Recent Developments in Corporate Governance: An Overview." *Journal of Corporate Finance* 12 (3): 381-402.
- Hackston, David, dan Markus J. Milne. 1996. "Some Determinants of Social and Environmental Disclosure in New Zealand Companies." *Accounting, Auditing, and Accountability Journal* 9 (1): 77-108.
- Haniffa, R. M., dan T. E. Cooke. 2002. "Culture, Corporate Governance, and Disclosure in Malaysian Corporations." *ABACUS* 38 (3): 317-349.

- Healy, Paul M., dan George Serafeim. 2016. "An Analysis of Firms' Self-reported Anticorruption Efforts." *The Accounting Review* 91 (2): 489-511.
- Hess, David. 2009. "Catalyzing Corporate Commitment to Combating Corruption." *Journal of Business Ethics* 88 (4): 781-790.
- Hidalgo, Ruth L., Emma Garcia-Meca, dan Isabel Martinez. 2011. "Corporate Governance and Intellectual Capital Disclosure." *Journal of Business Ethics* 100 (3): 483-495.
- Holderness, Clifford G. 2017. "Culture and the Ownership Concentration of Public Corporations Around the World." *Journal of Corporate Finance* 44: 469-486.
- Jaggi, Bikki, Sidney Leung, dan Ferdinand Gul. 2009. "Family Control, Board Independence, and Earning Management: Evidence Based on Hong Kong." *Journal of Accounting and Public Policy* 28 (4): 281-300.
- Jankensgard, Hakan. 2018. "Between a Rock and a Hard Place: New Evidence on the Relationship Between Ownership and Voluntary Disclosure." *International Review of Financial Analysis* 56: 281-291.
- Joseph, Corina, Juniati Gunawan, Yussri Sawani, Mariam Rahmat, Josephine Avelind Noyem, dan Faizah Darus. 2016. "A Comparative Study of Anti-corruption Practice Disclosure Among Malaysian and Indonesian Corporate Social Responsibility (CSR) Best Practice Companies." *Journal of Cleaner Production* 112 (4): 2896-2906.
- Karamanou, Irene, dan Nikos Vafeas. 2005. "The Association between Corporate Boards, Audit Committees, and Management Earnings Forecast: An Empirical Analysis." *Journal of Accounting Research* 43 (3): 453-486.
- Khrishnamurti, Chandrasekhar, Syed Shams, dan Eswaran Velayutham. 2018. "Corporate Social Responsibility and Corruption Risk: A Global Perspective." *Journal of Contemporary Accounting and Economics* 14 (1): 1-21.
- Kim, Daniel S., Yun Li, dan Domenico Tarzia. 2018. "Value of Corruption in China: Evidence from Anti-corruption Investigation." *Economics Letters* 164: 112-116.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2018. Undang - Undang Pendukung. Diakses April 27, 2018. <https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/undang-undang-pendukung>.
- La Porta, Rafael, Florencio Lopez-de-Silanes, dan Andrei Shleifer. 1999. "Corporate Ownership Around the World." *The Journal of Financial* 54 (2): 471-517.
- Li, Jing, Musa Mangena, dan Richard Pike. 2012. "The Effect of Audit Committee Characteristics on Intellectual Capital Disclosure." *The British Accounting Review* 44 (2): 98-110.
- Miller, Gregory S. 2004. "Discussion of What Determines Corporate Transparency?" *Journal of Accounting Research* 42 (2): 253-267.
- National Committee on Governance. 2006. "Indonesia's Code of Good Corporate Governance." Diakses Maret 20, 2018. http://www.ecgi.org/codes/document/indonesia_cg_2006_en.pdf.
- Samaha, Khaled, Hichem Khelif, dan Khaled Hussainey. 2015. "The Impact of Board and Audit Committee Characteristics on Voluntary Disclosure: A Meta-Analysis." *Journal of International Accounting, Auditing, and Taxation* 24: 13-28.
- Shleifer, Andrei, dan Robert W. Vishny. 1997. "A Survey of Corporate Governance." *The Journal Of Finance* 52 (2): 737-783.
- Srinidhi, Bin N., Shaohua He, dan Michael Firth. 2014. "The Effect of Governance on Specialist Auditor Choice and Audit Fees in U.S. Family Firms." *The Accounting Review* 89 (6): 2297-2329.
- Transparency International. 2019. Corruption Perception Index 2019. Diakses April 10, 2019. <https://www.transparency.org/en/cpi2019>.
- Vanza, Samir, Peter Wells, dan Anna Wright. 2018. "Do Asset Impairments and the Associated Disclosure Resolve Uncertainty about Future Return and Reduce Information Asymmetry?" *Journal of Contemporary Accounting and Economics* 14 (1): 22-40.
- Wolk, Harry I., James L. Dodd, dan John J. Rozycki. 2013. *Accounting Theory: Conceptual Issue in a Political and Economic Environment*. Eighth Edition. United States of America: SAGE.

- World Bank. 2017. *Combating Corruption*. Diakses Februari 3, 2018. <http://www.worldbank.org/en/topic/governance/brief/anti-corruption>.
- . 2016. "Corporate Governance." Diakses Maret 19, 2018. <http://www.worldbank.org/en/topic/financialsector/brief/corporate-governance>.
- . 2014. "The Indonesia Corporate Governance Manual." Diakses Maret 20, 2018. <http://document.worldbank.org/curated/en/551471487074479045/The-Indonesia-corporate-governance-manual>.
- . 2018. What is Fraud and Corruption? Diakses Maret 11, 2018. <http://www.worldbank.org/en/about/unit/integrity-vice-presidency/what-is-fraud-and-corruption>.
- Xie, Biao, Wallace N. Davidson, dan Peter J. DaDalt. 2003. "Earnings Management and Corporate Governance: The Role of the Board and the Audit Committee." *Journal of Corporate Finance* 9: 295-316.
- Zeng, Yamin, Edward Lee, dan Junsheng Zhang. 2016. "Value Relevance of Alleged Corporate Bribery Expenditures Implied by Accounting Information." *Journal of Accounting and Public Policy* 35 (6): 592-608.
- Zeume, Stefan. 2017. "Bribes and Firm Value." *The Review of Financial Studies* 30 (5): 1457-1489.